

PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Nur Endah Purwaningsih
Jurusan Teknologi Industri
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

ABSTRAK

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar siswa secara sadar dan aktif mengembangkan potensi dirinya, agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yg diperlukan individu dalam masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas, pasal 1 ayat 1). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang dilaksanakan untuk membekali siswa dengan ketrampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, menyiapkan lulusan yang siap kerja. Karakter adalah: Nilai-nilai yang unik-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Dalam *pengertian makna pendidikan karakter* di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

PENDAHULUAN

Pentingkah pendidikan karakter untuk Sekolah Menengah Kejuruan ? Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang dilaksanakan untuk membekali siswa dengan ketrampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja. Lulusan SMK yang dipersiapkan untuk langsung terjun kedalam dunia usaha dan industri, alangkah lengkapnya bila dibekali dengan nilai-nilai karakter yang baik, sehingga mereka akan mudah beradaptasi dengan lingkungan, baik lingkungan pekerjaan maupun lingkungan masyarakat. Karakter adalah: Nilai-nilai yang unik-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata

berkehidupan baik) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.

Untuk merealisasikan gagasan ini alangkah baiknya bila pendidikan karakter dimasukkan dalam kurikulum SMK, terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain dan dilaksanakan dalam program sekolah. Sehingga penanaman nilai-nilai karakter bagi warga sekolah agar menjadi bangsa yang beradab dan insan kamil tercapai.

PEMBAHASAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar siswa secara sadar dan aktif mengembangkan potensi dirinya, agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yg diperlukan individu dalam masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas, pasal 1 ayat1).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang dilaksanakan untuk membekali siswa dengan ketrampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, menyiapkan lulusan yang siap kerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah Bab 1, pasal 1 ayat 3: bahwa pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah, yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. SMK memfokuskan pada suatu program keahlian tertentu yang sesuai dengan lapangan kerja (Perpustakaan UPI).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah (Wiki Pedia).

Karakter adalah: Nilai-nilai yang unik-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik) yang terpatri dalam diri

dan terejawantahkan dalam perilaku. Tujuan pembangunan karakter bangsa adalah: Membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berkeTuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Sumber: Kemdiknas, 2010)

Pendidikan Karakter menurut Bambang Nurokhim (artikel Cakrawala TNI AL, 2007:3), pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak, baik rumah tangga, keluarga, sekolah, lingkungan sekolah dan masyarakat luas. Pembentukan dan Pendidikan karakter tersebut tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan keharmonisan, (kumpulan makalah SEMNAS UPI).

Menurut (Deni Hardianto) bila dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa, pendidikan bisa diartikan secara lebih sempit sebagai suatu cara membangun dalam berkehidupan bersama. Dalam skala tataran antar komunitas, tanpa melihat etnis, suku, agama, ras dan sebagainya, berkehidupan bersama berarti telah sepakat secara sadar untuk melakukan ikatan bagi anggotanya menjadi suatu komunitas yang dilakukan dalam wilayah yang pasti dan sah, serta diakui komunitas masyarakat lainnya (*baca: internasional*). Dari sudut pandang inilah kemudian timbul berbagai teori tentang bangsa dan negara. Karakter bangsa muncul dari komunitas-komunitas yang memiliki ikatan dan aturan yang jelas. Dalam hal ini pendidikan berperan penting membangun persamaan persepsi antar komunitas sehingga terjalin komunitas yang memiliki karakter yang jelas dan kuat. Jika pendidikan gagal dalam membangun persepsi antar komunitas maka yang akan terjadi adalah perpecahan dan perbedaan serta akan memudarkan nilai-nilai kebangsaan dan akan berdampak pada hilangnya karakter bangsa.

Kegagalan pendidikan dalam membangun karakter bangsa disebabkan banyak faktor. Karena ada banyak komponen dalam pendidikan seperti pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana maupun komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan nasional. Keseriusan pemerintah harus dibuktikan dengan aksi nyata yaitu dengan memberikan anggaran pendidikan yang memadai, meningkatkan kesejahteraan pendidik serta memberikan pengelolaan pendidikan kepada yang ahli di bidangnya dalam artian pendidikan jangan dijadikan sebagai komoditas kepentingan politik. Selain dari itu pendidik (guru) juga harus memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun mentalitas dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, pendidik harus sadar bahwa mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan dan pembangunan generasi penerus bangsa.

Dalam konteks memahami pendidikan, menarik apa yang disarankan UNESCO bahwa pendidikan harus mengandung tiga unsur: (a) belajar untuk tahu (*learn to know*), (b) belajar untuk berbuat (*learn to do*) dan (c) belajar untuk hidup bersama (*learn to live together*). Unsur pertama dan kedua lebih terarah membentuk *having*, agar sumberdaya manusia mempunyai kualitas dalam pengetahuan dan keterampilan atau *skill*. Unsur ketiga lebih terarah *being* menuju pembentukan karakter bangsa. Kini, unsur itu menjadi amat penting. Pembangkitan rasa nasionalisme, yang bukan ke arah nasionalisme sempit; penanaman etika berkehidupan bersama, termasuk berbangsa dan bernegara; pemahaman hak asasi manusia secara benar, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, pengembangan sensitivitas sosial dan lingkungan dan sebagainya, merupakan beberapa hal dari unsur pendidikan melalui belajar untuk hidup bersama. Pendidikan dari unsur ketiga ini sudah semestinya dimulai sejak Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Penyesuaian dalam materi dan cara penyampaiannya tentu saja diperlukan. (Deni Hardianto)

A. Makna Pendidikan Karakter (Yudinet. Com).

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.

Dalam *pengertian makna pendidikan karakter* di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Terlepas dari berbagai kekurangan dalam praktik pendidikan di Indonesia, apabila dilihat dari standar nasional pendidikan yang menjadi acuan pengembangan kurikulum (KTSP), dan implementasi pembelajaran dan penilaian di sekolah, tujuan pendidikan di SMK sebenarnya dapat dicapai dengan baik. Pembinaan karakter juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya, pendidikan karakter di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai, dan belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan grand design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. **Pengertian makna pendidikan karakter** atau konfigurasi

karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokkan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development), Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and kinesthetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity development). Pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada grand design tersebut, (Yudinet Com).

B. Kurikulum SMK (*dalam Kajian Kebijakan Kurikulum SMK Direktorat Pembinaan SMK*)

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Untuk mengetahui apakah kebijakan baru mengenai kurikulum telah menyebabkan adanya perubahan, dapat dievaluasi oleh setidaknya-tidaknya tiga indikator (Fullan, 2001).

Pertama, sejauh mana materi-materi baru atau yang direvisi digunakan oleh guru-guru. *Kedua*, sejauh mana pendekatan-pendekatan pengajaran yang baru telah diterapkan dalam proses kegiatan-kegiatan belajar di kelas. *Ketiga*, sejauh mana guru-guru berkeyakinan bahwa kebijakan berdampak kepada perbaikan mutu dan proses pembelajaran. Ketiga indikator tersebut secara bersama-sama akan menentukan tercapai tidaknya tujuan-tujuan perubahan pendidikan.

Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa yang akan

datang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan berani menghadapi, mampu memecahkan, dan berhasil mengatasi masalah kehidupan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting, ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja.

Pemikiran ini mengandung konsekuensi bahwa penyempurnaan atau perbaikan pendidikan menengah kejuruan untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan perlu terus-menerus dilakukan, diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, perkembangan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bisnis.

Penyempurnaan bagi setiap kebijakan, pada hakikatnya merupakan suatu perubahan, yang seharusnya dilakukan dari waktu ke waktu. Namun, setiap penyempurnaan seringkali disikapi sebagai hal baru yang terkadang dapat menimbulkan perbedaan persepsi bagi setiap pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Fullan (2001) mengatakan, akan timbul perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk setiap perubahan pada sektor pendidikan. Dari sisi pembuat kebijakan, terdapat asumsi bahwa pada umumnya guru-guru sebagai pelaksana kebijakan cenderung kurang menyukai adanya perubahan. Sebaliknya, guru-guru cenderung meyakini bahwa perubahan dimaksud adalah untuk kepentingan pembuat kebijakan dan tidak sepenuhnya didasarkan atas filosofi yang kuat dan jelas mengenai perlunya perubahan. Guru-guru juga meyakini bahwa umumnya pembuat kebijakan kurang memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada saat dilaksanakannya proses pembelajaran.

Bennie dan Newstead (1999) menegaskan bahwa setiap perubahan selalu menemui kendala dalam implementasinya. Terkait dengan

perubahan kebijakan kurikulum, beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kendala mencakup antara lain waktu, harapan-harapan dari pihak orangtua, kelangkaan bahan pembelajaran termasuk bukubuku pelajaran pada saat implementasi kurikulum yang baru, kekurangjelasan konsep kurikulum yang baru, dan guru-guru kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan dikaitkan dengan kurikulum baru tersebut. Sedangkan Nolder (1990) dan Snyder dkk. (1992) menyatakan bahwa kendala lain menyangkut kemungkinan beban mengajar yang bertambah, peran guru yang berubah sebagai fasilitator, dan sistem pelaporan. Lebih lanjut Charters dan Jones (1973) menyatakan bahwa setiap perubahan pada sektor pendidikan seharusnya diikuti dengan upaya mengamati berbagai bentuk operasional di lapangan sebagai tindak lanjut dan implikasi dari perubahan kebijakan tersebut. Setiap kendala atau hambatan harus segera diantisipasi sebelum menimbulkan masalah yang besar dan kompleks. Ketidakmampuan mengatasi kendala-kendala tersebut akan menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan atau perubahan tersebut.

Suatu studi menunjukkan bahwa umumnya hambatan yang ditemui dalam implementasi suatu kurikulum adalah kurangnya kompetensi guru-guru. Seringkali terjadi bahwa implementasi suatu kurikulum baru tidak diikuti dengan pertimbangan kemampuan guru dan tindakan bagaimana meningkatkan kemampuan guru-guru sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum dimaksud (Hargreaves, 1995). Hal ini didukung oleh Fennema dan Franke (1992) yang menyatakan bahwa kemampuan baik secara keterampilan dan pengetahuan seorang guru akan mempengaruhi proses pembelajaran di kelas dan menentukan sejauh mana kurikulum dapat diterapkan.

Studi lain yang dilakukan oleh Taylor dan Vinjevold (1999) mengungkapkan bahwa kegagalan implementasi kurikulum disebabkan oleh rendahnya pengetahuan konseptual guru, kurang penguasaan terhadap

topik yang diajarkan, dan kesalahan interpretasi dari apa yang tertulis dalam dokumen kurikulum. Menurut Middleton (1999), berhasil tidaknya implementasi kurikulum yang diperbaharui cenderung ditentukan oleh persepsi atau keyakinan yang dimiliki oleh guru.

Perubahan kurikulum berkait dengan perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma baik langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak bagi para guru di mana mereka perlu melakukan penyesuaian. Sangat mungkin penyesuaian yang dilakukan akan memberikan ketidaknyamanan lingkungan pembelajaran bagi guru yang bersangkutan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa para guru akan bersikap mendukung implementasi dimaksud apabila mereka memahami kurikulum baru tersebut secara rasional dan praktikal. Bennie dan Newstead (1999) menyarankan untuk diadakannya penataran bagi guru secara intensif untuk dapat memahami filosofi dan substansi dari kurikulum yang baru. Supaya berhasil, mereka menyarankan agar perubahan kurikulum tidak dilaksanakan lebih dahulu sebelum diperoleh keyakinan secara faktual bahwa para guru benar-benar tahu apa yang seyogianya dilakukan dengan kurikulum yang baru. Dengan kata lain, implementasi suatu kurikulum baru memerlukan waktu dalam proses transisinya.

Menarik untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Hawkins dan Kapadia (1984) tentang pengalaman mereka berinteraksi dengan guru untuk implementasi kurikulum yang baru. Dikatakan bahwa kadang-kadang pengembang kurikulum justru menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini disebabkan kenyataan dalam banyak kasus bahwa pengembang kurikulum banyak yang sebenarnya tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mengajar. Padahal mereka dituntut untuk memberikan contoh kepada para guru. Ditemukan oleh Hawkins dan Kapadia beberapa kasus di mana pengembang kurikulum

yang berkonsultasi dengan guru-guru di lapangan untuk menemukan strategi mengajar yang tepat untuk topik-topik yang tertulis dalam dokumen kurikulum.

Untuk mengetahui apakah kebijakan baru mengenai kurikulum telah menyebabkan adanya perubahan, dapat dievaluasi oleh setidaknya-tidaknya tiga indikator (Fullan, 2001). *Pertama*, sejauh mana materi-materi baru atau yang direvisi digunakan oleh guru-guru. *Kedua*, sejauh mana pendekatan-pendekatan pengajaran yang baru telah diterapkan dalam proses kegiatan-kegiatan belajar di kelas. *Ketiga*, sejauh mana guru-guru berkeyakinan bahwa kebijakan berdampak kepada perbaikan mutu dan proses pembelajaran. Ketiga indikator tersebut secara bersama-sama akan menentukan tercapai tidaknya tujuan-tujuan perubahan pendidikan. Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa yang akan datang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang bersangkutan berani menghadapi, mampu memecahkan, dan berhasil mengatasi masalah kehidupan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting, ketika seseorang harus memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja.

Pemikiran ini mengandung konsekuensi bahwa penyempurnaan atau perbaikan pendidikan menengah kejuruan untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan perlu terus-menerus dilakukan, diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, perkembangan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bisnis.

C. Kelompok Mata Pelajaran dan Struktur Kurikulum SMK

1. Kelompok Mata Pelajaran

Uraian tentang kelompok mata pelajaran yang berisi deskripsi kelompok mata pelajaran spesifik SMK, merujuk kepada Permen 22 tahun 2006, meliputi tiga kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok normatif, kelompok adaptif, dan kelompok produktif. Kelompok normatif adalah kelompok mata pelajaran yang dialokasikan secara tetap yang meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Seni Budaya.

Kelompok adaptif terdiri atas mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi, dan Kewirausahaan. Kelompok produktif terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dikelompokkan dalam Dasar Kompetensi Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai kekhususan. Kekhususan tersebut terletak pada mata pelajaran produktif. Seperti halnya mata pelajaran lain, standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL) mata pelajaran produktif juga perlu dikaji. Kegiatan kajian diusulkan agar dilakukan dengan melibatkan para guru dan dosen berpengalaman industri, para profesional DU/DI dalam bidangnya serta asosiasi profesi terkait. Pelibatan mantan anggota Kelompok Bidang Keahlian (KBK) pada Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) sangat disarankan. Buram final perlu disebar-luaskan secara terbuka kepada para pemangku kepentingan untuk mendapat masukan. Mengingat KTSP SMK harus mengacu pula pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sedangkan belum semua program keahlian memiliki SKKNI, perlu upaya sinergis dengan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk penyusunan SKKNI terkait yang belum terbit.

2. Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum berisi uraian tentang jumlah jam pelajaran setiap matapelajaran, minimal sesuai dengan standar isi untuk semua jenis program/jurusan pada sekolah untuk setiap semester yang berlaku pada tahun pelajaran itu. Standar isi merujuk kepada Permen 22 tahun 2006, merujuk kepada panduan penyusunan kurikulum KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP. Struktur Kurikulum yang dituangkan dalam bentuk matrik, memuat tentang nomor, kode kompetensi, kelompok mata pelajaran/kompetensi, tahun/tingkat dan semester serta jumlah jam.

Berdasarkan analisis pelaksanaan di lapangan, penambahan mata pelajaran pada kelompok normatif (Seni Budaya) dan pada kelompok adaptif (Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam) berdampak pada beban belajar peserta didik di sekolah menengah kejuruan di satu sisi, di sisi lain berkurangnya alokasi waktu untuk mata pelajaran produktif. Sehingga beban jumlah jam belajar dengan perbandingan alokasi waktu tatap muka, praktik sekolah dan praktik industri (1:2:4) berimplikasi pada penyediaan waktu lebih banyak dari yang diamanatkan pada standar isi (mengakomodasi jumlah jam perminggu mak. 40 jam) Oleh karena itu jam real praktik disekolah dan industri harus dihitung serta melakukan penambahan jumlah jam pelajaran lebih dari 4 jam pelajaran untuk memenuhi pencapaian standar kompetensi lulusan.

SIMPULAN

Bila dilihat dari isi dan pengembangan kurikulum di SMK, nampaknya pendidikan karakter belum ada dalam sajian kurikulum. Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang dilaksanakan untuk membekali siswa dengan ketrampilan yang sesuai dengan bakat dan

minatnya, menyiapkan lulusan yang siap kerja. Lulusan SMK berbeda dengan lulusan sekolah menengah pada umumnya. Lulusan SMK memiliki ketrampilan khusus yang telah dipersiapkan oleh sekolah, sehingga bila mereka lulus, sudah memiliki ketrampilan yang dapat digunakan untuk menyiapkan kehidupannya, baik untuk bekerja maupun untuk usaha sendiri. Lulusan SMK dipersiapkan untuk menyongsong lapangan kerja dalam dunia usaha dan industri.

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.

Karakter adalah: Nilai-nilai yang unik-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, ahlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain (Kamus Poerwodarminto). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa membangun karakter adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik dan dapat dibedakan dengan orang lain. Lulusan SMK yang dipersiapkan untuk langsung terjun kedalam dunia usaha dan industri, alangkah lengkapnya bila dibekali dengan nilai-nilai karakter yang baik, sehingga mereka akan mudah beradaptasi dengan lingkungan, baik lingkungan pekerjaan maupun lingkungan masyarakat.

Untuk merealisasikan gagasan ini alangkah baiknya bila pendidikan karakter dimasukkan dalam kurikulum SMK, terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain dan dilaksanakan dalam program sekolah. Sehingga penanaman nilai-nilai karakter bagi warga sekolah agar menjadi bangsa yang beradab dan insan kamil tercapai.

REFERENSI

- Bambang Nurokhim (artikel Cakrawala TNI AL, 2007;3), *Kumpulan Makalah Semnas 2010, Pendidikan Karakter Membangun Bangsa Beradab*, Program Studi Pendidikan Umum Sekolah Pasca Sarjana UPI, Bandung.
- Bennie, K. & Newstead, K. 1999. "Obstacles to implementing a new curriculum." dalam M.J. Smith & A.S. Jordaan (Eds.) *Proceedings of the National Subject Didactics Symposium* (pp. 150-157). Stellenbosch: University of Stellenbosch.
- Charters, W. & Jones, J. (1973). *On the neglect of the independent variable in program evaluation*. Unpublished paper. Eugene: University of Oregon.
- Deni Hardianto, *Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Staf Pengajar Jurusan KTP, FIP.
- Fennema, E. & Franke, M.L. 1992. "Teachers' knowledge and its impact." Dalam Grouws, D.A. (Ed.). *Handbook of research on mathematics teaching and learning* (pp. 147-164). New York, United States: MacMillan.
- Fullan, M.G. 2001. *The new meaning of educational change*. London: Routledge Falmer.
- Hargreaves, A. 1995. *A changing teachers, changing times*. New York, NY: Teachers College Press.
- Hawkins, A.S. & Kapadia, R. 1984. "Children's conceptions of probability—A psychological and pedagogical review." *Educational Studies in Mathematics*, 15, 349-377.
- Yudinet. Com, *Makna Pendidikan Karakter*.
- Kurikulum SMK, 2007**, *Kajian Kebijakan Kurikulum SMK Direktorat Pembinaan SMK*, Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Kajian Teori, Konsep Sekolah Menengah Kejuruan*, Perpustakaan UPI, Bandung.
- Middleton, S. 1999. *Between a rock and shifting sands: Issues of curriculum implementation in secondary schools*. Paper disajikan dalam "The Telecom Technology Education Conference", Kings College, Auckland, New Zealand, 16 April 1999.
- Nolder, R. 1990. "Accommodating curriculum change in mathematics: Teachers' dilemmas." dalam Booker, G., Cobb, P. & de Mendicuti, T.N. (Eds.). *Proceedings of the Fourteenth Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education* (pp. 167-174). Mexico City, Mexico.
- Taylor, N. & Vinjevold, P. 1999. *Getting learning right: Report of the President's Education Initiative Research Project*. Johannesburg, South Africa: Joint Education Trust.
- Wikipedia, *Pengertian pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan*.

